

# Integrasi Sistem Gaji, Honorarium dan Pajak Penghasilan - PPh Pegawai di Rumah Sakit Umum Pusat - RSUP

Kholid Haryono

Jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14 Yogyakarta 55510  
Telp (0274) 895287 ext 122, fax (0274) 895007 ext 148  
kholid.haryono@uii.ac.id

**Abstract.** Paper ini membahas pelajaran dari implementasi integrasi sistem keuangan modul gaji & tunjangan, pengelolaan honorarium dan aplikasi e-SPT Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada sebuah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Indonesia. Sebagai unit pelayanan kepada masyarakat sekaligus unit bisnis milik pusat, rumah sakit mengelola banyak pegawai dalam penggajian dan pemberian honorarium. Penggajian telah dikelola menggunakan sistem gaji yang dirilis oleh Ditjend Perbendaharaan Negara sedangkan honorarium pegawai terkait kegiatan operasional layanan dan honorarium tim kegiatan masih dikelola secara terpisah. Lebih lanjut, kedua output tersebut harus diinput ulang melalui aplikasi e-SPT untuk pelaporan pajak bulanan dan akhir periode. Terdapat tiga aplikasi yang terlibat dan saling terkait untuk diintegrasikan oleh bagian keuangan sebagai unit yang bertanggungjawabkan laporan pajak. Penelitian ini menunjukkan proses integrasi ketiga sistem yang digunakan dengan karakteristik independensi antar sistem yang terlalu kuat. Sistem honorarium yang berada ditengah dipilih sebagai *bridging* yang menjembatani sistem gaji dan sistem e-SPT akibatnya kompleksitas implementasi semakin menurun karena pusat kendali berada pada satu titik. Uji kinerja sistem dilakukan pada titik yang langsung mengendalikan proses integrasi tersebut dan hasil testing terhadap kinerja sistem adalah baik dengan pencapaian rata-rata per item uji komponen 97.04%. Sedangkan pencapaian uji terhadap fungsi sistem rata-rata per item uji adalah 94.37%. Hal ini menunjukkan fungsi item juga berjalan dengan baik.

**Keywords :** integrasi sistem, aplikasi pph, rsup, sistem honorarium

## 1 Introduction

Mengelola sistem keuangan pada institusi yang kompleks merupakan tantangan. Hal ini terjadi pada sebuah rumah sakit pusat di kota Klaten Jawa Tengah. Dua bidang pengelolaan keuangan yang utama adalah penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berasal dari kas negara, retribusi pelayanan, klaim asuransi, dan penerimaan lainnya. Sedangkan pengeluaran meliputi gaji dan tunjangan, belanja barang dan jasa, belanja operasional rutin termasuk honorarium dan pengembalian kelebihan belanja.

Khusus pengelolaan gaji, tunjangan, dan pengeluaran operasional yang terkait dengan pemberian upah kepada pegawai berdasarkan peraturan DJP<sup>12</sup> harus dilaporkan secara periodik melalui aplikasi e-SPT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Umumnya pengelolaan gaji dan tunjangan telah menggunakan aplikasi penggajian yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, sedangkan

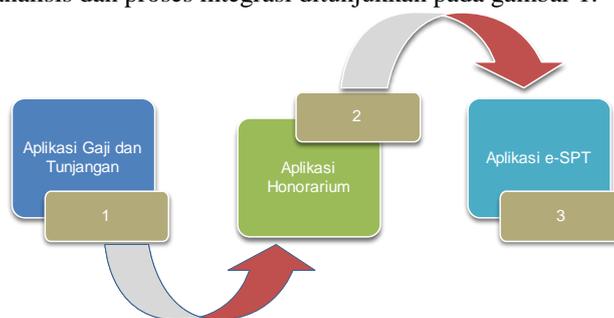
penerimaan pegawai yang berasal dari jasa operasional layanan dan tim pelaksana kegiatan tidak dicatat pada sistem gaji, padahal pajak yang dikenakan setiap penerimaan upah pegawai harus dilaporkan melalui e-SPT.

Awalnya e-SPT hanya melaporkan rekapitulasi potongan pajak yang dipotong bendahara, tidak dilaporkan setiap pegawai. Sejak versi 1.0 e-SPT 2009, komponen penerimaan selain gaji dan tunjangan yakni penerimaan jasa layanan dan tim kegiatan harus dilaporkan per kuitansi setiap pegawai untuk potongan pph pasal 21 final dan non final. Petugas akan melakukan entri ulang pada sistem e-SPT setiap kuitansinya, hal ini berpengaruh pada penambahan beban pekerjaan, redundansi transaksi, dan tingkat kesulitan saat verifikasi data pada e-SPT dibandingkan dengan bukti transaksi jika terjadi selisih angka.

Penelitian ini mendeskripsikan proses integrasi sistem dari gaji, sistem honorarium jasa layanan & tim pelaksana, dan sinkronisasi dengan e-SPT pada lingkup rumah sakit umum. Kontribusi penelitian ini sebagai *best practice* dan pelajaran baik bagi pengembang sistem yang menghadapi kasus serupa maupun bagi pengguna yang berkepentingan terhadap integrasi sistem yang memiliki karakteristik yang sama.

## 2 Methodology

Integrasi sistem gaji dan honorarium ke sistem e-SPT dimulai dengan analisis sumber data untuk sistem gaji guna pengambilan data pegawai dan transaksi gaji yang akan disinkronisasi. Sedangkan pemberian upah selain gaji, yakni honorarium operasional layanan dan tim kegiatan dibuatkan sistem baru yang bertugas mengelola honor-honor dan potongan pajak setiap pegawai yang digunakan rutin setiap penerbitan kuitansi honorarium. Data pada sistem ini akan dikirim ke e-SPT sehingga laporan periodik dan akhir tahun pajak dapat dilakukan menggunakan sistem resmi DJP tanpa harus input ulang. Urutan analisis dan proses integrasi ditunjukkan pada gambar 1.



**Gambar 1.** Alur proses data dan integrasi sistem

Berdasarkan gambar 1 terdapat tiga bagian utama yakni : bagian pertama aplikasi gaji. Bagian ini melakukan analisis data dan struktur yang dapat diambil untuk kepentingan pelaporan ke e-SPT. Proses pengambilan data dilakukan secara otomatis dengan teknik pengambilan langsung basisdata ke basisdata. Kelengkapan data yang

ditemukan pada bagian pertama menjadi masukan desain pada pembuatan sistem honorarium bagian kedua.

Bagian kedua adalah pengembangan aplikasi honorarium untuk mencatat pengeluaran diluar gaji terkait insentif pegawai yang berasal dari honor operasional layanan dan honor tim pelaksana kegiatan. Sistem ini nantinya akan menampung data pegawai dan data gaji dari sistem gaji serta mengirimkan laporan pajaknya ke e-SPT sehingga kelengkapan atribut dan informasi sistem didesain untuk dapat berkomunikasi dengan kedua sistem gaji dan e-SPT. Pada tahap ini, langkah-langkah pengembangan sistem mengikuti *General System Development Life Cycle (SDLC)*, meliputi : tahap analisis → desain → implementasi → testing<sup>3</sup>

Bagian ketiga sinkronisasi dengan sistem e-SPT. Tahap ini melakukan mapping data pada sistem honorarium yang akan dikirimkan ke sistem e-SPT sebagai sistem akhir laporan pajak periodik dan akhir tahun.

### **3 Integrasi Sistem Honorarium dan PPh**

Proses integrasi<sup>4</sup> adalah proses pokok yang menentukan keberhasilan dan kegagalan sistem honorarium dengan sistem gaji dan e-SPT. Proses ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan yang paling menentukan dalam proses integrasi adalah tahap analisis. Melihat arsitektur data pada aplikasi gaji dan e-SPT secara mendalam merupakan kunci keberhasilan integrasi karena inti integrasi pada penelitian ini adalah menggabungkan operasi gaji, pembayaran honorarium, dan pelaporan e-SPT. Hasil analisis menjadi dasar perancangan desain. Implementasi dilakukan berdasarkan desain yang telah dirancang untuk selanjutnya diuji coba/testing dalam level laboratorium dan *user acceptance test*.

#### **3.1 Tahap Analisis**

Inti dari proses analisis adalah komunikasi<sup>5</sup>. Integrasi sistem pada penelitian ini melibatkan tiga bagian yakni bendahara gaji, bendahara pengeluaran, dan bendahara urusan pajak. Bagian bendahara gaji mengkaji informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan pajak. Bagian bendahara pengeluaran menganalisis kebutuhan transaksi honorarium yang masih dijalankan secara manual termasuk kontrol-kontrol potongan pph setiap pegawai. Bagian pajak menganalisis data yang dibutuhkan oleh e-SPT.

Bagian gaji adalah pengampu operasional sistem gaji. Informasi yang dibutuhkan e-SPT adalah besarnya gaji dan tunjangan serta potongan yang dibayarkan oleh setiap pegawai. Transaksi yang diambil meliputi kuitansi pembayaran gaji setiap pegawai dan data pegawai.

Bagian bendahara pengeluaran terutama pada proses bisnis dan transaksi honorarium yang dibutuhkan untuk memudahkan proses sinkronisasi informasi ke e-SPT. Transaksi honorarium pada bagian ini dikelompokkan menjadi dua yakni honor tim dan honor pelayanan. Honor tim adalah honor yang diberikan sebagai insentif dari tim kegiatan, sedangkan honor pelayanan adalah honor yang dibayarkan sebagai tambahan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus atau waktu-waktu tertentu. Kedua

kelompok memiliki jenis dokumen yang bermacam-macam sehingga kuitansi yang diterbitkan sesuai dengan jenis dokumen setiap kelompoknya. Jenis dokumen honorarium pelayanan terdiri dari 66 dokumen dan dokumen tim terdiri dari 39 dokumen. Jenis tersebut dapat bertambah sesuai kebutuhan manajemen.

Pajak yang dikenakan setiap dokumen terdiri dari dua jenis pajak yakni PPh pasal 21 final dan non final. Pengenaan pajak secara fleksibel dapat dilakukan setiap dokumen ketika diterbitkan. Transaksi yang dikirim ke e-SPT adalah seluruh transaksi pajak pph 21 final dan non final per dokumen per pegawai dan dikirim ke e-SPT setiap periode akhir bulan tepatnya setelah tutup buku bulanan.

Ketiga analisis dengan bagian pajak untuk menentukan data yang akan dikirim ke e-SPT dan kesesuaian kolom pada dokumennya sehingga tidak ada lagi input ulang potongan pajak pada aplikasi e-SPT. Informasi pokok yang dibutuhkan oleh e-SPT adalah data pegawai, data gaji dan potongan, dokumen pph 21 final, dokumen pph 21 non final per pegawai, dan data induk NPWP bendahara pengeluaran.

Berdasarkan hasil analisis tiga bagian tersebut, pokok proses integrasi disusun sebagai berikut :

- a. Sistem dapat memberikan kemudahan dalam operasional dan kontrol honorarium di RSUP.
- b. Tidak ada input ulang jika data telah tersedia pada sumber data lain.
- c. Untuk memudahkan implementasi tahap awal sistem di operasikan pada entitas yang sedikit yakni titik pusat operasional honorarium dan bagian pajak.
- d. Pelaporan pajak ke DJP menggunakan e-SPT tanpa input ulang.
- e. Memberikan kemudahan verifikasi data untuk kontrol data bersih.

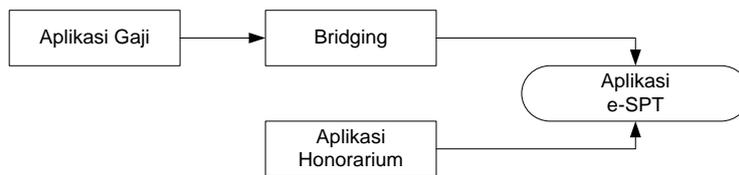
### 3.2 Tahap Desain

Tahap desain melibatkan proses bisnis yang utama dan memungkinkan mendesain kembali proses bisnis untuk perbaikan<sup>6</sup>. Berdasarkan hasil analisis telah dirumuskan *user requirement* sistem yang akan dibuat untuk menjembatani integrasi aplikasi gaji dan honorarium agar dapat masuk ke aplikasi e-SPT sebagai hasil akhir dari output yang diharapkan. Desain sistem pada tahap ini meliputi desain sinkronisasi (import – export) dan desain sistem honorarium. Desain sinkronisasi membuat peta *link* antara aplikasi gaji dan aplikasi honorarium yang dibuat, serta *link* antara output informasi sistem honorarium ke sistem e-SPT. Sedangkan desain sistem honorarium meliputi antar muka sistem dan desain basisdata.

#### a. Desain Sinkronisasi

Sinkronisasi yang dilakukan melibatkan dua proses. Proses pengambilan data gaji ke e-SPT dan proses pengiriman data pph dari sistem honorarium ke e-SPT. Hasil analisis memungkinkan dibuat beberapa pilihan sinkronisasi. Pilihan pertama seperti ditampilkan pada gambar 1 yang menunjukkan bahwa data dari sistem gaji ditransfer ke sistem honorarium kemudian bersamaan dengan data honorarium disinkronisasi ke sistem e-SPT disebut juga sinkronisasi tanpa *bridging*.

Pilihan kedua, data dari sistem gaji dibuatkan aplikasi kecil sebagai *bridging* (jembatan) yang mengirimkan langsung ke e-SPT. Secara terpisah aplikasi honorarium juga mengirimkan data ke e-SPT seperti tampak pada gambar 2.



**Gambar 2.** Proses integrasi menggunakan *bridging*

Kedua pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut ditunjukkan pada tabel 1

**Tabel 1 .** Kelebihan dan kekurangan *bridging* dan *non bridging*

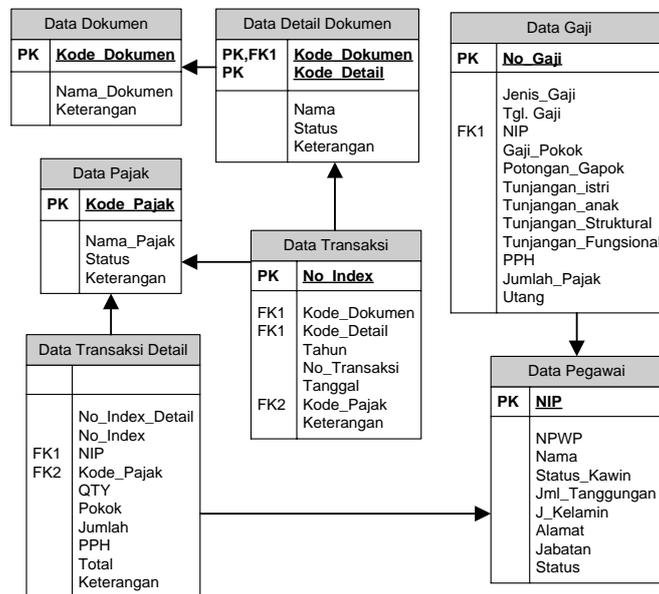
Pilihan	Kelebihan	Kekurangan
<i>Bridging</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masing-masing entitas dapat melakukan sinkronisasi tanpa harus saling menunggu.</li> <li>Jika terdapat kesalahan mudah diketahui siapa yang bertanggungjawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses verifikasi data lebih kompleks</li> <li>Aplikasi e-SPT harus terus tersambung, padahal sinkronisasi periodenya tidak harian.</li> </ul>
<i>Non Bridging</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas sinkronisasi berada pada satu entitas sehingga lebih mudah dikontrol.</li> <li>Training operasi sistem hanya satu titik yakni pengampu sistem honorarium.</li> <li>Verifikasi lebih simple</li> <li>Lebih mudah diimplementasikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pengampu sinkronisasi lebih banyak.</li> <li>Jika terdapat perubahan pada sistem gaji dan terlanjur dikirim ke e-SPT koreksinya lebih sulit.</li> </ul>

Berdasarkan hasil analisis kelebihan dan kekurangan pilihan sinkronisasi, penelitian ini memilih sinkronisasi *non bridging* seperti gambar 1. Untuk mengatasi kekurangan pilihan ini seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, tentang kinerja pengampu sedikit lebih banyak dapat dibagi tugas dengan bagian pajak yang kinerjanya berkurang akibat otomatisasi proses ini, sedangkan terkait koreksi yang lebih sulit setelah sinkronisasi dapat diatasi dengan cara penambahan fitur hapus sumber sebelum sinkronisasi dilakukan jika sebagian data sudah masuk ke data tujuan.

#### **b. Desain Sistem Honorarium**

Sebagaimana pengembangan sistem baru, desain sistem honorarium dimulai dari penyusunan desain basisdata. Sumber informasi desain basisdata berasal dari arsitektur data yang berhasil dibaca dari sistem gaji dan e-SPT serta kebutuhan transaksi honorarium (proses bisnis). Data pokok yang diambil dari sistem gaji adalah data pegawai dan data gaji beserta potongannya. Khusus data pegawai dicatat pada tabel master yang diambil dari sistem gaji sehingga terhindar dari kemungkinan duplikasi.

Desain sistem honorarium dibuat untuk dapat menampung data gaji dan potongan operasional honorarium yang dibutuhkan oleh e-SPT. Hubungan antar tabel dalam desain sistem ini ditunjukkan pada gambar 3.



**Gambar 3.** Relasi data pokok sistem honorarium

Data dokumentasi pada gambar 3 digunakan untuk membedakan kelompok dan jenis dokumen dengan tujuan memberikan kemudahan kontrol transaksi. Data transaksi dan detail transaksi digunakan untuk mencatat transaksi utama yang berisi tanggal kejadian, pegawai, jenis dokumen, dan pajak yang dikenakan. Data gaji digunakan untuk menampung data dari sistem gaji secara periodik, dan data pegawai merupakan master data yang dirujuk oleh detail transaksi dan data gaji.

Desain data yang dikirim ke e-SPT adalah struktur data gaji, data pegawai, data transaksi yang dikenakan PPh pasal 21 final dan non final. Data tersebut diambil dan diformulasikan dari desain honorarium. Tabel-tabel pada e-SPT yang menerima data adalah :

- Tabel DS\_FORM\_INDUK, berfungsi sebagai tabel induk untuk membuka periode entri atau laporan baru. Tabel ini dirujuk oleh tabel detail.
- Tabel DAT\_PROFILE, berfungsi menyimpan data NPWP bendahara pengeluaran yang telah didata pada aplikasi e-SPT sebagai bendahara yang bertanggungjawab mengumpulkan laporan pajak ke DJP.
- Tabel DS\_FORM\_BP, berfungsi untuk mencatat transaksi per dokumen per pegawai berdasarkan jenis dokumen e-SPT. Jenis 02 untuk pelaporan pajak PPh pasal 21 tidak final dan jenis 03 untuk PPh pasal 21 final.
- Tabel DAT\_1721T, digunakan untuk menyimpan data gaji dan potongan yang berasal dari gaji tetap dan tunjangan (diluar honorarium).

Sinkronisasi dilakukan secara langsung dengan membuka link/ODBC e-SPT, memasukkan data set dari query data honorarium dengan kolom-kolom tabel e-SPT.

### 3.3 Tahap Implementasi

Implementasi merupakan fase lanjutan setelah desain selesai dan fase ini sebaiknya tidak mendahului atau dikerjakan bersamaan dengan fase desain<sup>7</sup>. Fase ini fokus pada tiga aktifitas pokok, yakni : manajemen pemrograman, penyusunan *log activity*, dan manajemen jadwal. Penyusunan tiga aktifitas tersebut didasarkan pada kompleksitas *requirement* sistem dan desain yang telah dibuat.

Manajemen pemrograman, adalah proses pemilihan tim programmer, job deskripsi masing-masing programmer, standar *coding*, dan standar operasional prosedur komunikasi dalam tim. Programmer yang baik tidak selalu yang memiliki skil yang tinggi, akan tetapi kemampuan bekerjasama dalam tim dan *leadership* lebih utama. Tim integrasi sistem terdiri dari tiga programmer. Satu programmer basisdata dan dua lainnya programmer sistem dengan komposisi job deskripsi seperti tabel 2.

**Tabel 2.** Job deskripsi programmer

No	Tim	Deskripsi
1	Programmer Basisdata	Membuat source script SQL untuk : <ul style="list-style-type: none"><li>• Create structure basisdata dan tabel termasuk constraint/relationship.</li><li>• Create procedure dan function meliputi insert, update, dan delete.</li><li>• Create trigger</li><li>• Create index</li><li>• Create view untuk tampilan, rekap informasi, dan pelaporan.</li><li>• Mendokumentasikan source code.</li></ul>
2	Programmer Sistem	Membuat antarmuka dan fitur berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat antar muka transaksi</li><li>• Membuat kontrol daftar transaksi</li><li>• Membuat laporan</li><li>• Mengintegrasikan sistem utama dan laporan</li><li>• Debugging sistem</li><li>• Mendokumentasikan source code.</li></ul>

Standar *coding* ditentukan oleh *leader* programmer yakni programmer basisdata karena ia berlaku sebagai *library* programming yakni pemrogram mesin utama sistem. Programmer sistem hanya sebagai eksekutor fungsi dan prosedur dari *library* yang dibuat dan disusun oleh programmer basisdata.

Standar operasional prosedur komunikasi dibuat seluruh tim dan disepakati untuk dijalankan secara disiplin. Prosedur mengatur tentang : a) pemahaman tugas teknis masing-masing programmer, b) pertemuan rutin, c) perubahan desain dan standar *coding*, d) dokumentasi termasuk *sharing* data dan pengaturan keamanan file, dan e) pengaturan jadwal integrasi source code.

Penyusunan *log activity* penting untuk menjaga pekerjaan selesai tepat waktu. Masing-masing programmer mempunyai *log activity* dan ditempatkan di lokasi yang dapat diakses oleh lainnya untuk saling sinergi dalam menyelesaikan pekerjaan. Secara periodik *log activity* di *approve* oleh *leader* programmer.

Penyusunan jadwal merupakan aktifitas ketiga pada tahap implementasi untuk menjaga ketepatan dan target penyelesaian sistem. Jadwal dibagi menjadi tiga aktifitas pokok, yakni : a) aktifitas pengembangan/programming sistem honorarium, b) aktifitas

programming import data dari sistem gaji, dan c) aktifitas programming export data ke aplikasi e-SPT.

### 3.4 Tahap Testing

Testing merupakan fase yang menentukan sistem siap di-*deliver* untuk digunakan oleh pengguna. Area testing adalah *system test* dan *acceptance test*<sup>7</sup>. Kegagalan testing dapat berakibat fatal, kehilangan kepercayaan pengguna, kerusakan data yang membutuhkan waktu perbaikan, dan meningkatkan tingkat stres programmer. Sebaliknya sistem yang diimplementasikan setelah lulus testing yang baik merupakan pintu utama keberhasilan perubahan manajemen (*change management*) bersamaan dengan diterimanya sistem untuk diimplementasikan.

Testing dilakukan dalam dua fase, Pertama : laboratorium testing (*componens performance*) yakni uji program berjalan dengan baik, input-proses-output sesuai dengan prosedur dan proses bisnis yang dibutuhkan. Testing ini dilakukan oleh pihak yang memahami dan mengetahui proses bisnis sistem. Uji ini disebut juga *white box testing*. Lokasi testing dilakukan pada unit keuangan dua user dan penanggungjawab satu orang.

Hasil uji *componens performance* ditunjukkan pada tabel 3

**Tabel 3.** Hasil uji *componens performance*

No	Aktifitas	User1 %	User2 %	Penanggung jawab %
1	Spesifikasi sistem sesuai <i>requirement</i>	100	100	100
2	Integrasi dengan sistem gaji	98	90	100
3	Integrasi dengan sistem e-SPT	95	90	100
4	Fungsi pencatatan honorarium	100	100	100
5	Kesesuaian input proses output	100	100	100
6	Kemudahan kontrol	95	100	90
7	Membantu manajemen	90	90	100
	Jumlah Rata-Rata	96.85	95.71	98,57
	Rata-rata hasil uji	97.04 %		

Uji *componen performance* dilakukan oleh tiga orang, dua user dan satu penanggung jawab. Rata-rata hasil uji adalah 97.04 %, hal ini menunjukkan hasil testing terhadap kinerja komponen baik. Temuan item yang paling rendah nilainya adalah terkait sistem telah “membantu manajemen” kedua user memberikan nilai 90% karena mereka memiliki ekspektasi setelah menggunakan sistem tidak lagi berurusan dengan bukti fisik. Sistem belum sepenuhnya bisa *paperless* karena belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut dan bukti fisik masih menjadi bukti penting dalam proses auditing.

Testing kedua adalah *functions performance* yakni menguji program berdasarkan ketangguhan untuk memastikan fungsi berjalan dengan benar, terbebas dari kesalahan interface, error data dan message error, dan kinerja sistem yang buruk. Komponen uji didapat dari pengisian kuisioner oleh user yang ditunjuk menguji sistem. Uji ini disebut juga *black box testing*. Hasil uji *function performance* ditunjukkan pada tabel 4.

**Tabel 4.** Hasil uji *function performance*

No	Aktifitas	User1 %	User2 %
1	Kesesuaian interface	100	100
2	Kesesuaian informasi error message	95	95
3	Tidak ada error data / <i>crash</i>	100	100
4	Kinerja sistem	85	80
	Jumlah Rata-Rata	95	93.75
	Rata-Rata	94.37 %	

Sebenarnya testing ini bisa dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui proses bisnis, akan tetapi agar mendapatkan kedalaman fungsi dan kelengkapan testing maka uji *function performance* dilakukan oleh user yang mengetahui proses bisnis. Berdasarkan tabel 4, hasil uji yang paling rendah adalah kinerja sistem, hal ini terjadi karena infrastruktur jaringan belum stabil sehingga proses integrasi berjalan lambat, jaringan sering terputus karena tidak stabil. Meski demikian, rata-rata hasil uji fungsi adalah 94.37% artinya secara fungsi dinyatakan baik.

## 4 Conclusion

Pelajaran penting yang dapat diambil dari implementasi proses integrasi sistem PPh pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) adalah : a) sinkronisasi data untuk sistem-sistem yang telah berjalan dilakukan dari sistem yang dibuat sebagai *bridging* agar tidak menambah kompleksitas implementasi; b) sistem *bridging* dibuat *simple* dengan tingkat otomatisasi menengah keatas sehingga manfaat kemudahan sistem lebih cepat diperoleh; c) pengembangan sistem integrasi menggunakan pendekatan *botton up* karena kebutuhan lebih kepada peningkatan efisiensi kinerja sehingga tidak ada pekerjaan berulang terutama terkait input transaksi; d) penilaian terhadap proses pengerjaan dan hasil uji sistem mendapatkan *feedback* yang baik dari pengguna, hal ini karena pengguna dilibatkan secara langsung pada proses pengembangan dan testing sistem.

## 5 Pustaka

1. Kemententerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak RI. *Undang-Undang PPh Dan Peraturan Pelaksanaannya.*; 2013.
2. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak RI. *Undang-Undang KUP Dan Peraturan Pelaksanaannya.*; 2013.
3. Ragnath P. Evolving a new model (SDLC Model-2010) for software development life cycle (SDLC). *Int J* ..... 2010;10(1):112-119. <http://94.23.146.173/ficheros/d876aa1f2fc4819cac16501e73752d09.pdf>.
4. Quix C, Jarke M. Information integration in research information systems. *Procedia Comput Sci.* 2014;33:18-24. doi:10.1016/j.procs.2014.06.004.
5. Pressman RS. *Software Engineering.* Vol Fifth. New York: Thomas Casson; 2001.
6. Galliers RD, Leidner DE. *Strategic Information Management.* Vol Third. Butterworth-Heinemann; 2003.
7. Dennis A, Wixon BH, Roth RM. *System Analysis and Design.* Vol Fifth. New: Wiley & Sons; 2009.